

Jokowi, Mobil Esemka dan Kaidah Fiqhiyah

written by Harakatuna

Esemka, sebuah merek mobil yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan masyarakat Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan dinamika politik yang ada. Politik apa? Ya politik yang selalu dikaitkan dengan satu [sosok fenomenal, Joko Widodo](#) (Jokowi). Hal ini masuk akal, karena sejak menjabat Wali Kota Solo (saat ini menjabat Presiden RI), Jokowi-lah yang melambungkan nama [mobil Esemka](#), bahkan menyebutnya sebagai kebanggaan karena merupakan karya anak bangsa.

Apakah kemudian rasa kebanggaan terhadap karya anak bangsa ini disikapi positif oleh seluruh masyarakat Indonesia? Ternyata tidak demikian. Kelompok oposisi, jelas geram. Tuduhan mulai dilontarkan dengan menyebut Esemka hanya menjadi “kendaraan politik” Jokowi, pencitraan yang menipu rakyat, proyek mimpi atau ghoib, dan sebagainya.

Namun kemudian, setelah sekian lama digaungkan, pada September 2019, Presiden Jokowi seperti hendak menjawab semua tuduhan negatif itu dengan secara resmi meluncurkan mobil Esemka. Tapi apa mau dikata. Peristiwa ini lagi-lagi menjadi ‘gorengan’ politik kelompok oposisi yang selalu mencari celah kesalahan pemerintahan Jokowi. Jika sebelumnya kabar yang disebarkan yaitu Esemka adalah proyek mimpi, yang tidak akan terwujud, maka setelah kenyataan memperlihatkan bahwa Esemka bukan proyek mimpi, sejumlah isu negatif lain terus dilemparkan.

Tipudaya Rezim di Balik Esemka

Mari kita lihat isu apa saja terkait Esemka yang terus disebarkan untuk menyerang kredibilitas pemerintah, sekaligus bagaimana seharusnya kita memandang fenomena Esemka tanpa tendensi oposisi.

1. Isu: Esemka disebut-sebut sebagai Mobil

Nasional (mobnas).

Fakta: Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), produsen pembuat Esemka, Eddy Wirajaya mengungkapkan bahwa mobil Esemka yang diproduksi oleh perusahaannya bukanlah mobil nasional. Menurut Eddy, perusahaannya merupakan perusahaan nasional yang 100% dimiliki swasta, sehingga akan lebih tepat apabila disebut mobil buatan Indonesia atau karya anak bangsa.

Jadi: Sudah jelas ya, Esemka bukan mobil nasional. Kedudukannya sama dengan produk perusahaan swasta nasional lainnya. Sedikit beda hanya pada fakta bahwa Esemka adalah *brand* karya anak bangsa.

2. Isu: Esemka produk buru-buru untuk kepentingan politik Jokowi.

Fakta: Riset dan pengembangan Esemka sudah dimulai sejak tahun 2007, jauh sebelum sosok Jokowi dikenal masyarakat Indonesia di luar Surakarta (Solo). Proyek ini dimulai dari program *teaching factory* yang menghasilkan ide Esemka dan pertama kali tercetus pada 2007 oleh Direktorat Pembinaan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk bidang otomotif, ditunjuklah 4 (empat) SMK di Jawa Tengah dan 1 SMK di Jawa Timur sebagai perintisnya, yakni SMKN 2 Surakarta, SMKN 5 Surakarta, SMK Warga Surakarta, SMK Muhammadiyah 2 Borobudur Magelang, dan SMKN 1 Singosari Malang. Selanjutnya, tiga SMK di Solo berhasil merancang 5 unit dengan 2 jenis prototipe mobil, sedangkan dua SMK lainnya juga membuat prototipe, namun tidak didaftarkan ke PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) yang didirikan pada 2010.

Jadi: Dari sini terlihat bahwa gagasan Esemka diinisiasi oleh Kemendikbud RI, yang tentu saja tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi yang saat itu “hanya” seorang Walikota.

3. Isu: Esemka merupakan rebranding dari mobil produksi China.

Fakta: Meskipun diakui oleh Presdir PT SMK, bahwa sebagian komponen, terutama bagian dalam mesin Esemka masih diimpor dari China, namun

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa produksi Esemka memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sangat tinggi. Beberapa di antaranya adalah *chassis* dan bak yang diproduksi oleh PT INKA, blok mesin dan blok transmisi (PT Cikarang Persada Manufacturing), *dashboard* dan setir (PT Usra Tampi), Radiator (PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna), Kaca Depan (PT Armada Indah Agung Glass), Ban (PT Gajah Tunggal), Bak/Kargo (ACC Bawen Karoseri dan PT INKA), Pelumas (Pertamina), *Oil Filter* dan *Fuel Filter* dibuat oleh PT Selamat Sempurna, Accu (PT Nipress Energi Otomotif), *Air Filter* (PT Duta Nichindo Pratama), Knalpot (Catur Karya Manunggal), Jok (Bawen Karoseri), *Starter Assy* (Fuller Autoparts Indonesia), Per Daun (Indospring), *Shock Breaker* (Samudra Luas Paramacitra), dan masih banyak lagi.

Jadi: Kalau *rebranding* diartikan dengan hanya ganti logo, trus ngapain PT. SMK repot-repot melakukan kerja sama dengan penyuplai komponen kendaraan dalam negeri??

4. Isu: Produsen mobil China bisa laporkan Jokowi terkait pelanggaran hak paten.

Fakta: Berkolaborasi dengan perusahaan asing dalam mengembangkan suatu produk dalam negeri bukanlah hal tabu dalam industri. Dalam sejarahnya, sejak era Orde Baru, Indonesia sudah beberapa kali mencetuskan ide pembuatan mobil lokal (buatan dalam negeri) dengan menggandeng produsen kendaraan ternama dari luar negeri.

Tahun 90, ada MR 90 atau singkatan dari Mobil Rakyat tahun 90. MR 90 dirancang oleh orang asli Indonesia yaitu Soebronto Laras, tetapi karena kendala investasi, Soebronto menggandeng perusahaan dari Jepang dan lahirlah PT Mazda Indonesia Manufacturing (MIM) di Tambun Bekasi.

Tahun 1993, ada proyek mobil Maleo, di mana PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yang saat itu ditunjuk pemerintah untuk mengembangkan mobil nasional, melakukan kerja sama dengan perusahaan mobil Rover, asal Inggris dan Millard Design Australia.

Timor, mobil yang pernah cukup terkenal di Indonesia karena banyak terjual dan mengaspal di jalanan seluruh Indonesia. Timor dirancang dan diproduksi oleh PT. Timor Putra Nasional dengan menggandeng KIA dari Korea Selatan.

Texmaco Perkasa, sebuah nama produk truk dari PT Texmaco yang mempunyai kandungan lokal mencapai 90%. Namun demikian, masih ada kandungan komponen impor, yaitu mesin diesel yang digunakan adalah lisensi dari Cummin Amerika, persneling ZF dari Jerman, gardan (*axle*) dari Eston Amerika serta badan adalah lisensi dari Leyland (Inggris).

Sebagai perbandingan nih biar pada melek, kita lihat keberadaan mobil nasional di negara-negara tetangga di kawasan ASEAN yang juga menggandeng, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan negara luar.

Malaysia

Pada 24 Oktober 2018, Wakil Menteri Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia, Dr Ong Kian Ming menyebut Pemerintah Malaysia membuka pintunya bagi produsen otomotif Jerman untuk berpartisipasi dalam proyek mobil nasional Malaysia yang baru.

Pada Juni 2018, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan masih memiliki ambisi untuk mendirikan perusahaan mobil nasional baru sebagai pengganti Proton. Menurut Mahathir perusahaan otomotif baru tersebut akan berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan otomotif di Asia termasuk Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan.

Vietnam

Dalam kurun waktu dua tahun (2007-2009) Vietnam berhasil mewujudkan mobil nasional pertamanya yang bernama VinFast. Dengan alasan masih awam dalam memproduksi mobil hasil karya sendiri, Vietnam langsung menggandeng para ahli otomotif Eropa untuk ikut bergabung, dengan maksud agar mobil cepat terwujud dan tidak asal-asalan. Beberapa merek pabrikan otomotif terkemuka yang ikut bergabung untuk menggarap mobil nasional pertama Vietnam ini, yaitu Opel, BMW, Magna Steyr, serta rumah desain Pininfarina. Bahkan Mantan Wakil Presiden Global Manufacturing General Motors Jim Deluca ditunjuk sebagai bos VinFast.

Thailand

Pada Bangkok International Motor Show 2015, produsen mobil dalam negeri Thailand memperkenalkan satu kendaraan yang merupakan produk brand lokal, Thai Rung. Salah satu produknya adalah mobil SUV yang diberi nama Transformer. Menurut Sales Consultant Thai Rung Union Car Public, Yuthakan Saetan, mobil buatannya menggunakan basis dari Toyota Hilux, mulai dari sasis hingga mesinnya. Bahkan saat melihat interior, dari setir, dasbor sampai jok ternyata sama persis dengan Hilux buatan Toyota, Jepang.

Jadi: Pelanggaran hak paten mana yang dilanggar Jokowi?? Pertama, itu perusahaan swasta, apa 'hubungannya' sama Jokowi?? Kedua, kolaborasi tidak haram, bahkan sudah pernah dinyatakan secara umum, bahwa memang ada kerja sama dengan perusahaan mobil China. Negara-negara tetangga kita saja berani terang-terangan menyebut **MOBIL NASIONAL** mereka....sekali lagi **MOBIL NASIONAL**, adalah hasil kerja sama, kolaborasi, dan hasil 'nyontek' dari produsen mobil luar negeri. Hal itu justru dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Kalau kita minta produksi kendaraan keren tapi gak mau belajar dari yang sudah paham.... ya keblinger namanya.

5. *Isu: Jokowi kok heboh resmikan Esemka.*

Fakta: Jokowi tidak hanya meresmikan peluncuran Esemka ataupun pabriknya yaitu PT. SMK. Dalam perjalanan pemerintahannya, Presiden Jokowi tercatat: (a) meresmikan Pabrik V PT Pupuk Kalimantan Timur di Lapangan Kantor Pusat PT Pupuk Kaltim, Kota Bontang, pada 19 November 2015; (b) meresmikan pemancangan tiang perdana (*groundbreaking*) pembangunan pabrik amonia milik PT Panca Amara Utama (PAU) di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada 2 Agustus 2015; (c) meresmikan perluasan pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 21 April 2017; (d) meresmikan Pabrik PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di kawasan GIIC Deltamas Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 25 April 2017; (e) meresmikan Pabrik Bahan Baku Obat dan Produk Biologi PT Kalbio Global Medika di Cikarang, Bekasi, pada 27 Februari 2018; dan (f) melepas ekspor perdana mobil Mitsubishi Xpander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 25 April 2018, dan mengapresiasi Mitsubishi Motors yang melakukan ekspor perdana mobil hasil karya anak bangsa.

Jadi: Kalian saja yang bikin heboh karena semata-mata pikiran negatif terhadap Jokowi.

Dari sekian fakta ini, rasanya malah jadi aneh kalau terus meributkan keberadaan mobil Esemka, yang selalu dikaitkan dengan kepentingan politik Jokowi. Produsen Esemka adalah murni perusahaan swasta yang bebas berkreasi dan melakukan kerja sama dengan perusahaan asing manapun selama tidak melanggar aturan hukum yang ada. Fenomena Esemka terlihat jelas hanyalah suatu upaya dari segelintir kelompok oposisi yang hendak mendiskreditkan pemerintahan Jokowi dengan cara apapun.

Tidak banyak orang tahu atau lebih tepatnya pura-pura tidak tahu akan hakikat seorang pemimpin dalam Islam. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki kepedulian yang sangat tinggi dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa tau negara yang dipimpinnya, lebih-lebih kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat, tentu memiliki hak penuh terhadap rakyatnya dalam dimensi kepentingan yang laus dan menyeluruh.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang

pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemashlahatan bagi rakyatnya.

Aplikasi kaidah *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut, yang intinya adalah bahwa setiap kebijakan yang maslahat dan menfaat bagi rakyat harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya secara berkesinambungan. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, serta merta harus disingkirkan dan dijauhi. Dan mobil Esemka adalah salah satu contoh nyata aplikasi kaidah ushul fikih dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini dan Presiden Jokowi secara konsisten menjalankan kaidah yang sangat fundamental tersebut dalam mengatur sebuah negara-bangsa bernama Indonesia.

Firman Andyansyah, Sinolog